

## PERSEPSI MAHASISWA ILMU KOMUNIKASI UINSU TERHADAP KENAIKAN PPN 12% DAN DAMPAKNYA TERHADAP KESEJAHTERAAN SOSIAL

Hawa Nur Illai Lubis, Noviyana Dila Sari Lubis, Chairina Nova, Dila Sari Lubis, Wulan Sari Putri, Dian Permata

Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

### ARTICLE INFO

#### Article history:

Received Mei 2025

Revised Mei 2025

Accepted Mei 2025

Available online Mei 2025

#### Email:

[nnoviyana.dilasari.lubis@gmail.com](mailto:nnoviyana.dilasari.lubis@gmail.com)



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2025 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana persepsi mahasiswa Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) terhadap kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% dan dampaknya terhadap kesejahteraan sosial. Data penelitian dikumpulkan melalui survei yang dilakukan terhadap mahasiswa semester VI Jurusan Ilmu Komunikasi UINSU. Instrumen yang digunakan berupa kuesioner online dengan skala Guttman. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa persepsi mahasiswa tergolong cukup kritis. Sebanyak 74% responden menunjukkan tingkat pengetahuan yang tinggi tentang PPN 12%, 73% memiliki persepsi negatif terhadap kebijakan tersebut, 60% merasa terdampak secara ekonomi, dan 71% memandang bahwa kenaikan PPN berpengaruh terhadap peningkatan ketimpangan sosial. Temuan ini mencerminkan bahwa mahasiswa memiliki kesadaran yang cukup tinggi terhadap dampak kebijakan fiskal, baik dari sisi ekonomi pribadi maupun dimensi keadilan sosial. Oleh karena itu, diperlukan upaya edukasi perpajakan yang lebih masif dan penyusunan kebijakan fiskal yang lebih inklusif agar tidak menimbulkan beban berlebih bagi kelompok rentan.

**Kata Kunci:** PPN 12%, Persepsi Mahasiswa, Kesejahteraan Sosial

### Abstract

This study aims to determine the perception of students of the Communication Science Department of the State Islamic University of North Sumatra (UINSU) regarding the policy of increasing Value Added Tax (VAT) to 12% and its impact on social welfare. Research data were collected through a survey conducted on sixth semester students of the Communication Science Department of UINSU. The instrument used was an online questionnaire with a Guttman scale. The results of the study revealed that students' perceptions were quite critical. As many as 74% of respondents showed a high level of knowledge about the 12% VAT, 73% had a negative perception of the policy, 60% felt economically impacted, and 71% viewed that the increase in VAT had an impact on increasing social inequality. These findings reflect that students have a fairly high awareness of the impact of fiscal policy, both in terms of personal economics and the dimension of social justice. Therefore, more massive tax education efforts and the preparation of more inclusive fiscal policies are needed so as not to cause an excessive burden on vulnerable groups.

**Keywords:** PPN 12%, Student Perception, Social Welfare

## PENDAHULUAN

Pajak merupakan kontribusi wajib yang dibayarkan oleh individu atau badan usaha kepada negara berdasarkan ketentuan undang-undang. Sifatnya memaksa, tanpa adanya imbalan langsung, dan digunakan untuk membiayai kebutuhan negara serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu bentuk pajak tidak langsung dalam sistem perpajakan Indonesia yang menyumbang signifikan terhadap penerimaan negara adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). (Fitriyani, 2025). Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah jenis pajak yang dikenakan pada saat terjadinya penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP). Secara sederhana, PPN ialah pajak yang ditambahkan dalam setiap transaksi jual beli barang atau jasa tertentu. Dalam penerapannya, penjual yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha

Kena Pajak (PKP) wajib membuat faktur pajak elektronik sebagai bukti bahwa PPN telah dipungut. Selanjutnya, PKP juga berkewajiban untuk melaporkan pemungutan pajak tersebut setiap bulan melalui Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN. (Sherliana Octavia et al., 2025)

PPN dikenakan setiap transaksi jual beli barang dan jasa kena pajak di dalam negeri, termasuk impor. Mekanisme pemungutan PPN dilakukan oleh pihak penjual yang kemudian menyetorkannya ke kas negara. Dengan sistem ini, PPN menjadi instrumen yang efisien dalam menghimpun penerimaan negara karena bersifat multistage dan dikenakan di setiap produksi dan distribusi. Efektivitas PPN sebagai sumber penerimaan negara sangat bergantung pada kepatuhan wajib pajak serta sistem administrasi perpajakan yang transparan dan akuntabel. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 570/KMK.04/2000 Lampiran IV, produk dan jasa yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) meliputi Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP). BKP mencakup barang yang diperdagangkan di dalam negeri dan barang impor, kecuali yang secara khusus dikecualikan oleh undang-undang. Sementara itu, JKP mencakup jasa yang diberikan oleh pengusaha kena pajak kepada konsumen di dalam negeri, seperti jasa konstruksi, jasa konsultasi, jasa periklanan, dan jasa lainnya yang diatur oleh peraturan perpajakan.

Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia ditetapkan sebesar 11% mulai 1 April 2022, dan dinaikkan menjadi 12% yang berlaku sejak 1 Januari 2025, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Kenaikan PPN ini berpotensi meningkatnya harga barang dan jasa, yang dapat memicu inflasi. Meskipun dampaknya relatif kecil, penelitian menunjukkan bahwa kenaikan tarif PPN dapat meningkatkan inflasi sekitar 0,95%. Secara jangka panjang, kenaikan PPN ini dapat mempengaruhi konsumsi dan pertumbuhan ekonomi nasional. (Kharisma et al., 2023)

Tujuan utama dari kenaikan tarif PPN ini adalah untuk meningkatkan kontribusi PPN terhadap total penerimaan pajak negara yang selama ini relatif stagnan. Penerimaan PPN yang lebih tinggi diharapkan dapat menjadi sumber pendanaan yang lebih stabil bagi pemerintah, mengingat PPN merupakan salah satu pajak yang paling dominan dalam struktur perpajakan Indonesia. Peningkatan tarif ini juga bertujuan untuk mengurangi ketergantungan negara pada sumber pendapatan lainnya, seperti utang luar negeri, yang dalam jangka panjang bisa menambah beban fiskal negara. (Aisyah Aulia et al., 2025). Kenaikan tarif PPN ini juga dimaksudkan untuk memperluas basis pajak di Indonesia. Dengan adanya peningkatan tarif, diharapkan ada dorongan untuk meningkatkan kepatuhan pajak, karena pengenaan tarif yang lebih tinggi dapat mendorong masyarakat dan pelaku usaha untuk lebih mematuhi kewajiban perpajakan mereka guna menghindari potensi denda atau sanksi. Di sisi lain, kenaikan tarif ini juga berfungsi untuk memastikan bahwa pajak dipungut secara adil, seimbang, dan dapat mengakomodasi kebutuhan negara dalam pembangunan dan pemberian layanan publik yang lebih baik.

Kebijakan ini juga berupaya menciptakan sistem perpajakan yang lebih transparan dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh wajib pajak. Salah satu tujuan dari perubahan perpajakan ini adalah untuk mengurangi ketimpangan dalam pengumpulan pajak, dengan memperkenalkan mekanisme perpajakan yang lebih sederhana dan lebih efisien. Kebijakan kenaikan tarif PPN 12% merupakan salah satu strategi yang penting dalam rangka memperbaiki sistem perpajakan nasional dan memperkuat stabilitas ekonomi Indonesia. Meskipun terdapat tantangan dan potensi dampak jangka pendek, kebijakan ini diyakini akan memberikan manfaat besar bagi perekonomian Indonesia dalam jangka panjang jika diiringi dengan kebijakan yang mendukung pemerataan kesejahteraan dan pertumbuhan yang inklusif.

kebijakan kenaikan PPN menjadi 12% berdampak pada meningkatnya penerimaan negara, namun juga menimbulkan tantangan terhadap kesejahteraan masyarakat. kenaikan tarif PPN meningkatkan harga barang dan jasa, termasuk kebutuhan dasar seperti makanan,

pakaian, dan layanan esensial. Hal ini berisiko menurunkan daya beli rumah tangga miskin dan rentan, serta menghambat kemampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan dasar secara layak. Dalam konteks rasa aman ekonomi, beban pajak konsumsi yang lebih tinggi dapat menciptakan ketidakpastian dan kekhawatiran, khususnya bagi pekerja sektor informal dan masyarakat dengan pendapatan tidak tetap. Tanpa adanya kebijakan kompensasi yang memadai, dampak dari kenaikan PPN dapat memperlebar jurang ketimpangan sosial dan menghambat mobilitas ekonomi ke atas. Ketimpangan sosial juga berpotensi meningkat jika manfaat dari peningkatan penerimaan negara tidak didistribusikan secara adil. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk mengimbangi kebijakan kenaikan PPN ini dengan langkah-langkah protektif dan redistributif. (Viera et al., 2025)

Mahasiswa ialah kelompok intelektual dalam masyarakat yang umumnya memiliki sensitivitas dan sikap kritis terhadap dinamika isu sosial dan ekonomi, termasuk kebijakan fiskal seperti peningkatan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Sebagian besar mahasiswa telah mengetahui adanya kebijakan kenaikan PPN menjadi 12%, dengan media sosial sebagai sumber informasi utama. Meskipun demikian, tingkat pemahaman mereka mengenai tujuan dan implikasi dari kebijakan tersebut masih bervariasi, yang mengindikasikan bahwa peran lembaga pendidikan tinggi dalam meningkatkan literasi ekonomi mahasiswa belum sepenuhnya optimal. Kenaikan tarif PPN dirasakan berdampak langsung terhadap pengeluaran konsumsi harian mahasiswa, sehingga turut memengaruhi pola konsumsi mereka. Selain itu, persepsi terhadap keadilan kebijakan ini juga menunjukkan perbedaan, yang dipengaruhi oleh latar belakang sosial dan ekonomi masing-masing individu. (Pratama, 2024)

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi mahasiswa Jurusan Ilmu Komunikasi UINSU terhadap kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ditinjau dari aspek pengetahuan, sikap terhadap kebijakan, dampak ekonomi, dan pandangan terhadap kesejahteraan sosial. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang lebih jelas mengenai bagaimana persepsi mahasiswa terbentuk terhadap kebijakan ekonomi pemerintah, serta memberikan kontribusi bagi pengembangan literasi pajak dan kesadaran sosial di kalangan mahasiswa.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan ialah metode survei. Menurut Kriyanto (2008, sebagaimana dikutip dalam Ardian, 2013) Survey merupakan metode penelitian yang menggunakan kuesioner sebagai alat utama dalam mengumpulkan data. Tujuan utama dari metode ini adalah memperoleh informasi dari responden yang dianggap mewakili suatu populasi tertentu. Kuesioner digunakan untuk mengumpulkan data dari responden dalam penelitian survei. Secara umum, survey hanya didefinisikan sebagai studi di mana data dikumpulkan dari sampel populasi untuk mewakili keseluruhan populasi. Jadi, penelitian survey ialah "penelitian yang mengambil sampel dari suatu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data utama". Individu biasanya digunakan sebagai unit analisis dalam penelitian survei. Tujuan deskriptif dapat dicapai melalui penelitian survei. Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk menilai fenomena sosial tertentu secara tepat.

Jenis penelitian ini menggunakan metode survei yang dipadukan dengan penelitian kuantitatif. Pertanyaan-pertanyaan terstruktur digunakan dalam metode survei, yang merupakan teknik penelitian kuantitatif. Respons kemudian dicatat, diproses, dan diperiksa. Kuesioner digunakan sebagai alat penelitian dalam pendekatan ini, dan diberikan kepada responden. Pendekatan ini akan membantu dalam pemrosesan dan pengumpulan data. Peneliti dapat menarik kesimpulan tentang populasi menggunakan respons yang diberikan oleh peserta survei. Karena metode dan instrumen yang digunakan dalam penelitian ini telah terbukti dan

digunakan dalam studi-studi sebelumnya, maka validitas eksternal penelitian ini dapat dianggap kuat.

Sugiyono (2015:13) Penelitian deskriptif kuantitatif didefinisikan sebagai suatu pendekatan metodologis yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan objektif karakteristik suatu fenomena tanpa memerlukan analisis hubungan kausal maupun korelasional antar variabel. Pendekatan ini memungkinkan penggunaan satu atau lebih variabel bebas yang dianalisis secara independen. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini diuji melalui metode kuantitatif berbasis paradigma positivistik, yang menekankan pada objektivitas dan pengukuran empiris. Instrumen penelitian dirancang dengan memanfaatkan teknik pengumpulan data yang bersifat statistik dan kuantitatif, yang diterapkan pada populasi atau sampel penelitian yang telah ditentukan. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah untuk mendeskripsikan secara akurat, sistematis, dan metodologis berbagai peristiwa, gejala, atau kondisi tertentu. Teknik deskriptif kuantitatif tidak menuntut penarikan kesimpulan general atau interpretasi mendalam, melainkan fokus pada representasi faktual dari objek penelitian berdasarkan data yang diperoleh. (Ryazinarwa et al., 2024)

Penelitian ini dilakukan di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, tepatnya di Kampus IV yang terletak di Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Subjek penelitian adalah mahasiswa Ilmu Komunikasi semester 6, yang dipilih dari populasi sebanyak 260 mahasiswa Ilmu Komunikasi semester 6 yang terdaftar. Penelitian ini dilaksanakan selama bulan Mei 2025. Penggunaan kuesioner dalam studi ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang mendalam mengenai subjek penelitian sehingga data yang diperoleh dapat dianalisis guna mencapai tujuan penelitian, dengan menggunakan kuisisioner online sebagai alat ukur penelitian yang diberikan kepada mahasiswa semester VI jurusan Ilmu Komunikasi di Universitas Islam Negeri Sumatra Utara. Skala penilaian yang digunakan adalah skala Guttman yang hanya memiliki dua interval yaitu "YA" dan "TIDAK".

Data yang diperoleh dari Kuisisioner Online yang telah dibagikan kepada mahasiswa dianalisis lebih lanjut. Tahap awal dalam proses analisis ini adalah menghitung persentase persepsi mahasiswa dengan menggunakan rumus sebagai berikut.

$$x = \frac{\text{Persentase Skor } (x)}{\text{Jumlah Skor}} \times 100$$

$$x = \frac{\text{Jumlah Skor}}{\text{Jumlah Skor Maksimal}} \times 100$$

Selanjutnya, hasil persentase dari angket persepsi mahasiswa mengenai efektivitas kinerja himpunan mahasiswa diklasifikasikan berdasarkan kriteria penilaian berikut.

Indikator	Persentase		
	43,75 < x < 62,5	62,5 < x < 81,25	81,25 < x < 100
Pengetahuan Mahasiswa tentang PPN 12%	Kurang tahu	Tahu	Sangat tahu
Persepsi terhadap Kebijakan Kenaikan PPN 12%	Netral / Tidak Setuju	Negatif terhadap kebijakan	Sangat Negatif terhadap kebijakan
Dampak terhadap Kondisi Ekonomi Mahasiswa	Terdampak Ringan	Terdampak	Sangat Terdampak

Pandangan terhadap Dampak PPN terhadap Kesejahteraan Sosial	Dampak Sosial Rendah	Dampak Sosial Tinggi	Dampak Sosial Sangat Tinggi
---	----------------------	----------------------	-----------------------------

Setelah seluruh proses analisis dilakukan secara menyeluruh, langkah selanjutnya adalah menguraikan hasil analisis tersebut secara detail. Tahapan akhir dari proses ini berupa penarikan kesimpulan berdasarkan hasil analisis dan deskripsi data sebelumnya. Kesimpulan yang diambil harus didasarkan pada bukti yang kuat serta interpretasi yang mendalam, sehingga mampu memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap topik yang diteliti.

## HASIL PEMBAHASAN

Dalam artian secara luas, kesejahteraan sosial mencakup berbagai tindakan, upaya, serta kebijakan yang dilakukan oleh individu, kelompok, maupun negara dalam rangka mencapai kehidupan yang lebih baik, layak, dan bermartabat. Kesejahteraan sosial tidak hanya berkaitan dengan aspek material seperti sandang, pangan, dan papan, tetapi juga mencakup kebutuhan non-material seperti rasa aman, pendidikan yang memadai, kesehatan yang terjangkau, serta kesempatan yang setara dalam berbagai bidang kehidupan. Dalam konteks ini, kesejahteraan sosial dipahami sebagai suatu kondisi yang memungkinkan setiap individu untuk mengembangkan potensinya secara optimal dan berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Kesejahteraan sosial tentu tidak terlepas dari objek material utamanya, yaitu manusia. Manusia adalah subjek utama sekaligus sasaran dari setiap kebijakan atau program kesejahteraan sosial. Dalam kedudukannya sebagai makhluk sosial dan individu yang memiliki kebutuhan multidimensional, manusia memiliki peran sentral dalam proses pembangunan kesejahteraan itu sendiri. Hal ini menegaskan bahwa kesejahteraan sosial menyangkut pada kemampuan manusia dalam memenuhi kebutuhannya secara mandiri maupun melalui bantuan sistem sosial yang tersedia. (Mikyal Hardiyati et al., 2023)

Meskipun Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang stabil, kesejahteraan sosial masyarakat masih menghadapi berbagai tantangan serius. Ketimpangan ekonomi, kemiskinan, dan pengangguran tetap menjadi persoalan utama yang menghambat pemerataan kesejahteraan. Berbagai program bantuan seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan BPJS Kesehatan memang memberikan dampak positif, namun efektivitasnya sering terhambat oleh kendala regulasi, keterbatasan anggaran, kompetensi pelaksana, serta rendahnya partisipasi masyarakat. (Siti Alifa Fentiani et al., 2025) Tantangan ini semakin diperparah sejak pemerintah memberlakukan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12%, yang menambah beban ekonomi masyarakat, khususnya kalangan berpenghasilan rendah. Kenaikan harga barang dan jasa akibat PPN ini menurunkan daya beli dan berpotensi memperlebar kesenjangan sosial.

Persepsi mahasiswa terhadap kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12% merupakan isu strategis yang layak untuk dianalisis, mengingat mahasiswa termasuk dalam kelompok masyarakat yang turut merasakan dampak dari perubahan kebijakan ekonomi nasional. Dalam penelitian ini, instrumen angket yang terdiri atas empat indikator persepsi disebarkan kepada 30 responden. Adapun responden dalam studi ini merupakan mahasiswa semester VI Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Hasil angket yang disebarkan kepada responden dapat dianalisis dan disajikan dalam tabel berikut.

Indikator	Persentase	Hasil
Pengetahuan Mahasiswa tentang PPN 12%	74%	Tahu
Persepsi terhadap Kebijakan Kenaikan PPN 12%	73%	Negatif terhadap kebijakan
Dampak terhadap Kondisi Ekonomi Mahasiswa	60%	Terdampak Ringan
Pandangan terhadap Dampak PPN terhadap Kesejahteraan Sosial	71%	Dampak Sosial Tinggi

Berdasarkan hasil analisis terhadap angket persepsi mahasiswa mengenai kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12%, diperoleh temuan sebagai berikut: pada indikator pertama, sebesar 74% responden menunjukkan tingkat pengetahuan yang tinggi terhadap kebijakan tersebut. Indikator kedua menunjukkan bahwa 73% responden memiliki persepsi negatif terhadap kebijakan kenaikan PPN. Sementara itu, pada indikator ketiga, sebanyak 60% responden merasa terdampak secara ekonomi dalam kategori ringan. Adapun indikator keempat menunjukkan bahwa 71% responden menilai kebijakan ini memiliki dampak sosial yang signifikan.

Hasil analisis pada indikator pertama menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa memiliki tingkat pengetahuan yang cukup tinggi mengenai kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12%, dengan persentase sebesar 74%. Tingkat pengetahuan tersebut mencerminkan bahwa mayoritas responden telah memahami informasi dasar terkait PPN, termasuk pengertian PPN sebagai pajak atas konsumsi barang dan jasa, fakta bahwa pemerintah telah menaikkan tarif PPN, serta waktu pemberlakuan kebijakan tersebut yang direncanakan mulai tahun 2025. Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa cukup responsif terhadap isu-isu kebijakan fiskal yang sedang berkembang, khususnya yang berkaitan dengan beban konsumsi masyarakat.

Meski tergolong tinggi, hasil ini menunjukkan masih ada mahasiswa yang belum memahami kebijakan PPN 12% secara mendalam. Persentase yang belum mencapai kategori "sangat tinggi" mengindikasikan bahwa penyebaran informasi mengenai PPN 12% belum merata. Hal ini dapat disebabkan oleh keterbatasan akses informasi, minimnya minat, atau kurang optimalnya sosialisasi. Karena itu, dibutuhkan strategi komunikasi yang lebih efektif untuk meningkatkan literasi pajak. Dengan pemahaman yang lebih baik, mahasiswa diharapkan mampu bersikap kritis dan turut berperan sebagai agen edukasi dan kontrol sosial.

Hasil analisis pada indikator kedua memperlihatkan bahwa sebagian besar mahasiswa memiliki persepsi yang cenderung negatif terhadap kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12%, dengan persentase sebesar 73%. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas responden menilai kebijakan tersebut berpotensi memberatkan masyarakat, kurang tepat waktu, dan lebih menguntungkan negara dibandingkan rakyat. Sikap kritis mahasiswa ini menandakan adanya kesadaran sosial terhadap dampak kebijakan fiskal terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat. Meski begitu, hasil ini juga mencerminkan bahwa belum semua mahasiswa memahami latar belakang dan tujuan kebijakan secara menyeluruh. Oleh karena itu, dibutuhkan komunikasi kebijakan yang lebih transparan dan partisipatif agar mahasiswa tidak hanya bersikap reaktif, tetapi juga mampu memahami konteks kebijakan secara utuh dan objektif.

Hasil analisis pada indikator ketiga memperlihatkan bahwa sebagian besar mahasiswa merasakan dampak ekonomi secara moderat akibat kenaikan PPN 12%, dengan persentase sebesar 60%. Berdasarkan klasifikasi yang digunakan dalam penelitian ini, nilai tersebut berada pada rentang kategori dampak ekonomi rendah hingga sedang. Temuan ini menunjukkan bahwa kenaikan tarif PPN mulai dirasakan memengaruhi kondisi keuangan mahasiswa, terutama dalam hal pengeluaran bulanan dan kemampuan memenuhi kebutuhan pokok. Sebagian responden menyatakan telah mengurangi konsumsi barang atau jasa tertentu akibat adanya tambahan beban pajak. Meski belum masuk dalam kategori dampak tinggi, hasil ini mencerminkan adanya kekhawatiran mahasiswa terhadap kestabilan ekonomi pribadi mereka. Penting bagi pemerintah untuk mempertimbangkan dampak langsung kebijakan fiskal terhadap kelompok rentan, termasuk mahasiswa, serta memperkuat perlindungan ekonomi yang bersifat inklusif dan berkeadilan.

Hasil analisis pada indikator keempat memperlihatkan bahwa sebagian besar mahasiswa memiliki pandangan yang cukup kritis terhadap dampak kenaikan PPN 12% terhadap kesejahteraan sosial, dengan persentase sebesar 71%. Berdasarkan klasifikasi yang digunakan, nilai ini berada pada rentang dalam kategori persepsi negatif sedang. Temuan ini menunjukkan bahwa mayoritas mahasiswa menilai kebijakan kenaikan PPN berpotensi memperbesar kesenjangan sosial, terutama antara kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi dan rendah. Mahasiswa memandang bahwa kebijakan ini dapat memperburuk kondisi sosial-ekonomi kelompok rentan, seperti masyarakat miskin, mahasiswa, dan pekerja sektor informal, yang pengeluarannya akan lebih terdampak oleh peningkatan harga barang dan jasa akibat PPN.

Sebagian besar responden juga beranggapan bahwa kenaikan PPN akan berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat bawah, yang pada akhirnya dapat mengurangi akses mereka terhadap kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan pangan. Dalam pandangan mahasiswa, kebijakan ini tidak cukup mempertimbangkan aspek keadilan sosial, sebab beban pajak tidak dirasakan secara proporsional oleh semua lapisan masyarakat. Mereka menganggap bahwa tanpa adanya mekanisme kompensasi seperti subsidi atau perlindungan sosial tambahan, kebijakan ini dapat memperdalam jurang ketimpangan ekonomi dan sosial. Lebih lanjut, beberapa mahasiswa juga menyoroti bahwa kebijakan fiskal semestinya tidak hanya fokus pada peningkatan penerimaan negara, tetapi juga harus memperhatikan dampaknya terhadap pembangunan manusia dan kesejahteraan jangka panjang. Dalam konteks ini, mahasiswa melihat pentingnya peran negara dalam menjamin akses yang setara terhadap layanan dasar dan menjaga keseimbangan antara kepentingan fiskal dan perlindungan sosial.

Dengan demikian, hasil ini menunjukkan bahwa mahasiswa tidak hanya merasakan dampak ekonomi secara pribadi, tetapi juga menunjukkan kepedulian terhadap dampak sosial yang lebih luas dari kebijakan fiskal. Hal ini mencerminkan kesadaran sosial yang tinggi dan memberikan sinyal penting bagi pemerintah untuk mengintegrasikan prinsip keadilan sosial dalam setiap kebijakan perpajakan yang akan diberlakukan. Pendekatan yang lebih inklusif dan transparan dalam perumusan kebijakan menjadi kunci untuk membangun kepercayaan publik dan mendorong partisipasi aktif generasi muda dalam diskursus kebijakan publik.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, persepsi mahasiswa Ilmu Komunikasi UINSU terhadap kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12% menunjukkan respons yang cukup kritis namun juga informatif. Dari 4 indikator yang diukur melalui angket terhadap 30 responden, diperoleh hasil: 74% mahasiswa memiliki pengetahuan yang cukup baik tentang kebijakan PPN 12% (kategori "Tahu"), 73% menunjukkan persepsi negatif terhadap kebijakan (kategori "Negatif terhadap kebijakan"), 60% merasa terdampak secara ekonomi (kategori "Terdampak ringan"), dan 71% menilai kenaikan PPN membawa dampak sosial tinggi terhadap kesejahteraan



masyarakat (kategori “Dampak Sosial Tinggi”). Hasil ini menggambarkan bahwa meskipun mahasiswa cukup memahami kebijakan fiskal yang diberlakukan, mereka cenderung memandang kebijakan kenaikan PPN 12% sebagai kebijakan yang belum sepenuhnya berpihak pada kelompok rentan. Kenaikan tarif pajak ini dinilai memberikan beban tambahan terhadap kondisi ekonomi dan kesejahteraan sosial, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Oleh karena itu, persepsi mahasiswa mencerminkan adanya kebutuhan akan kebijakan kompensasi serta distribusi manfaat pajak yang lebih merata agar tujuan peningkatan penerimaan negara tidak justru memperlebar ketimpangan sosial.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah Aulia, Siti Maisaroh, Assyfa Putri Ananta, & Wahjoe Pangestoeti. (2025). Dampak Kenaikan PPN 12% terhadap Pendapatan Negara dan Kesejahteraan Masyarakat. *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik Dan Hukum Indonesia*, 2(1), 192-201. <https://doi.org/10.62383/amandemen.v2i1.773>
- Ardian, M. (2013). Sikap Masyarakat Surabaya Terhadap Program Acara. *JURNAL E-KOMUNIKASI PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI UNIVERSITAS KRISTEN PETRA, SURABAYA*.
- Fitriyani, F. (2025). Analisis Kesadaran Pajak dan Dampak Kenaikan PPN terhadap Pola Konsumsi Masyarakat. *Jurnal Ekonomi Bisnis Antartika*, 3(1), 69-74. <https://doi.org/10.70052/jeba.v3i1.698>
- Kharisma, N., Furqon, I. K., Abdurrahman, U. K. H., & Pekalongan, W. (2023). Analisis Dampak Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Terhadap Masyarakat Dan Inflasi Di Indonesia. *JurnalSahmiyya*, 2, 295-303.
- Mikyal Hardiyati, Hasanah, A. W., & Rohman, N. (2023). Analisis Kesejahteraan Sosial Sebagai Disiplin Ilmu. *ICODEV: Indonesian Community Development Journal*, 4(2), 89-94. <https://doi.org/10.24090/icodev.v4i2.9759>
- Pratama, R. B. (2024). PERSEPSI MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN TERHADAP KEBIJAKAN KENAikan PPN 12%. *JAMANTA: JURNAL MAHASISWA AKUNTANSI UNITA*, 4(2), 346-358. [https://doi.org/10.36563/jamanta\\_unita.v4i2.1263](https://doi.org/10.36563/jamanta_unita.v4i2.1263)
- Ryazinharwa, H., Safitri, D. N., Pratiwi, T., Andini, S. W., Santoso, B., & Harahap, N. (2024). Pengaruh Pola Komunikasi Organisasi Terhadap Persepsi Mahasiswa Tentang Efektivitas Kinerja Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. *Jurnal Bisnis Dan Komunikasi Digital*, 1(4), 8. <https://doi.org/10.47134/jbkd.v1i4.2764>
- Sherliana Octavia, Elisabeth Felicia, & Sri Handayani. (2025). Persepsi Mahasiswa Program Studi Akuntansi di Universitas Sriwijaya terhadap Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN). *Equivalent: Journal of Economic, Accounting and Management*, 3(2), 551-562. <https://doi.org/10.61994/equivalent.v3i2.952>
- Siti Alifa Fentiani, Yani Achdiani, & Gina Indah Permata Nastia. (2025). PERAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DALAM MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial HUMANITAS*, 7(1). <https://doi.org/10.23969/humanitas.v7i1.21718>
- Viera, J. J., Hamu, A., Hungu, L., Arief, A. P., Syahrani, A. N., Siswajanthi, F., Hukum, F., & Pakuan, U. (2025). DAMPAK KENAikan PAJAK PPN 12% TERHADAP PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DARI PERSPEKTIF PACASILA. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory DAMPAK*, 1-7.